



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENCATATAN PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN BATANG KAPAS PESISIR SELATAN

TESIS



**POPI SUSANTI
0821211040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PENCATATAN PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM DI
KECAMATAN BATANG KAPAS PESISIR SELATAN**

Oleh :

POPI SUSANTI

0821211040

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Program Ilmu Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG, 2010

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Judul Penelitian : **"Pencatatan Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Batang
Kapas Pesisir Selatan"**

Nama Mahasiswa : Popi Susanti

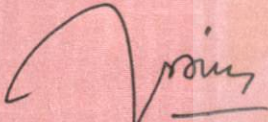
No. BP : 0821211040

Program Studi : Ilmu Hukum

Tesis ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Hukum pada program pascasarjana Unand dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 April 2010.

Menyetujui

I. Komisi Pembimbing

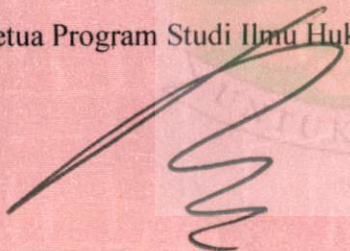


Prof. Dr. Yaswirman, MA
Ketua



Bachtiar Abna, SH, SU
Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
Nip : 131 803 173

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas



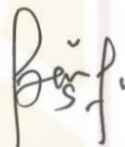
Prof. Dr. Ir. H. Novirman Djamarun, M.Sc
Nip : 130 819 552

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

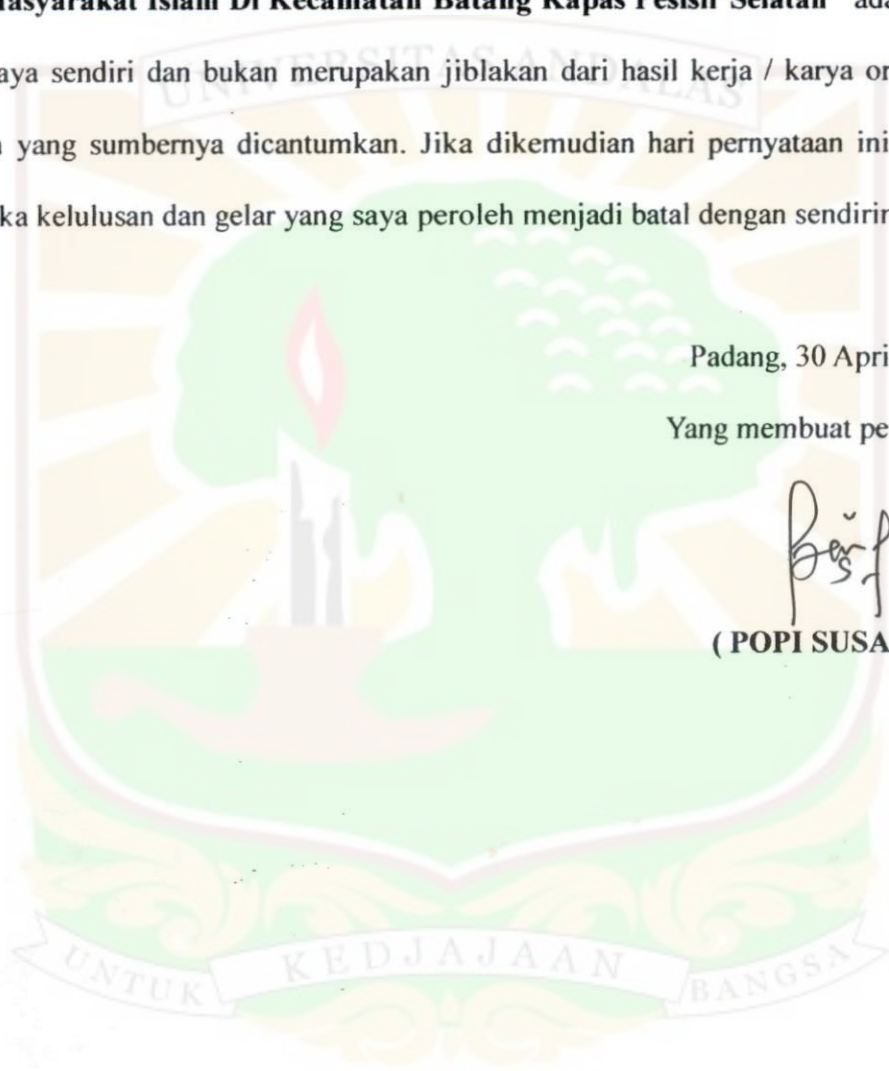
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul : **"Pencatatan Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan"** adalah hasil kerja / karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, maka kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 30 April 2010

Yang membuat pernyataan



(POPI SUSANTI)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan hidayahNya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **"Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan"**

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada sayyidina mursalin yakni Muhammad SAW.

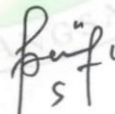
Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, berkat bantuan dan kerja sama dari semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini oleh karena itu penulis mengucapkan terimah kasih kepada :Bapak Prof. Dr. Yaswirman, MA dan Bapak Bachtiar Abna, SH, SU selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, sumbangan saran dan pikiran semenjak kolokium sampai selesainya tesis ini.

Dengan harapan, semoga segala bantuan, bimbingan dan jerih payah yang telah diberikan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT serta memperoleh keridhaan-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, memohon ampun, dan mengharapkan taufik serta hidayah-Nya. Semoga tesis ini bermamfaat bagi yang membacanya.

Padang, April 2010

Penulis



POPI SUSANTI
0821211040

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan	17
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	20
C. Syarat-syarat Sah Perkawinan	29
D. Akibat Hukum dari Perkawinan	31
E. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	33
F. Larangan Perkawinan	35
G. Tata Cara Perkawinan Kepentingan Pencatatan Perkawinan	37

BAB III : Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Masyarakat Islam Di

Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan

A. Pengurusan Izin Nikah.....	44
-------------------------------	----

B. Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	48
C. Pemeriksaan Nikah.....	48
D. Pengumuman Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	49
E. Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan.....	49
F. Penandatanganan Akta Nikah.....	57
G. Penyerahan Kutipan Akta Nikah.....	57

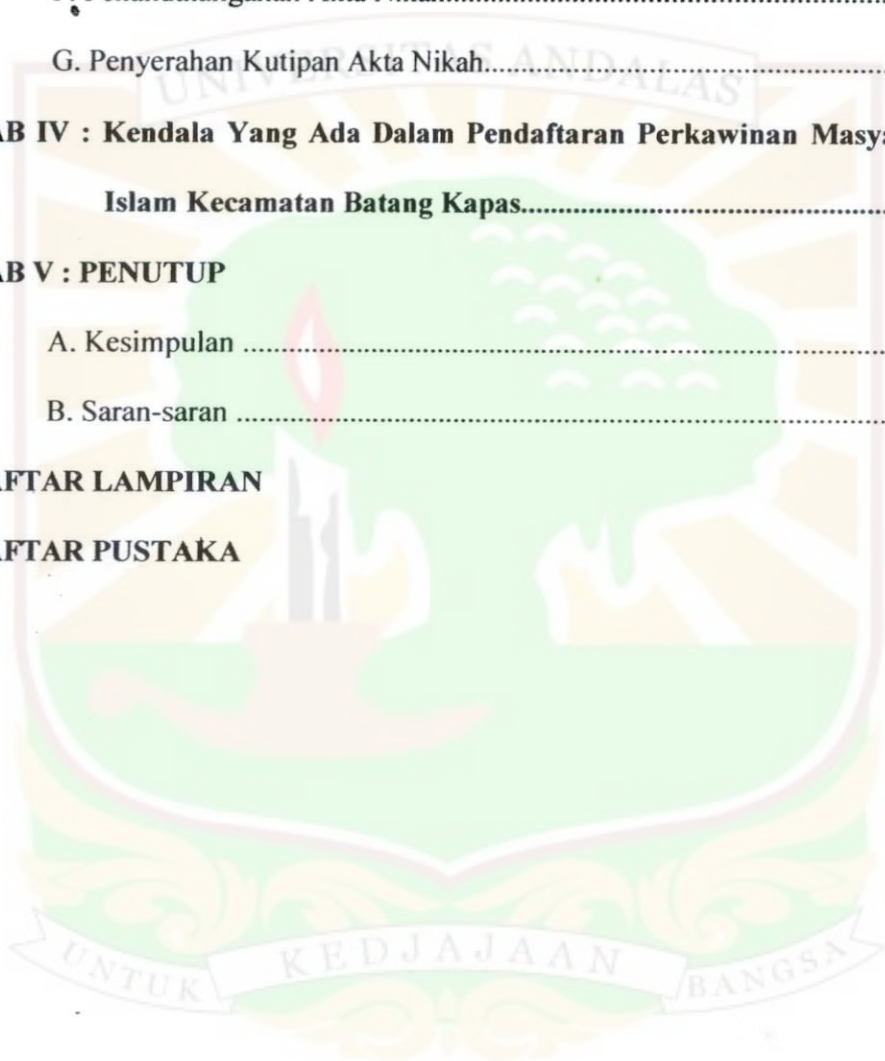
BAB IV : Kendala Yang Ada Dalam Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Islam Kecamatan Batang Kapas.....	73
--	-----------

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkawinan Yang Tercatat Dan Tidak Tercatat Di Kec.Batang Kapas Pesisir Selata.....	50
Tabel 2.	Kapan Masyarakat Mulai Mengetahui Aturan Pencatan Perkawinan dan Alasan mendaftarkan Perkawinan Mereka	51
Tabel 3	Perkawinan Tidak Tercatat.....	53
Tebel 4	Petugas yang Tidak Berwenang.....	54

ABSTRAK

Latar belakang dari tesis ini didasari adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan masyarakat kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan masih ada perkawinannya tidak tercatat.

Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas dan apa kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan masyarakat Kecamatan Batang Kapas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Kapas dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Sampel dari perkawinan yang tidak tercatat adalah 3 orang peristiwa, kepala KUA, penghulu, pegawai yang tidak berwenang.

Setelah penulis melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa responden yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan Masyarakat Islam Kecamatan Batang Kapas adalah pengurusan izin nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman pemberitahuan kehendak nikah, pelaksanaan pengesahan perkawinan, penandatanganan akta nikah, dan penyerahan kutipan akta nikah.

Kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan masyarakat Kecamatan Batang Kapas. Masyarakat Kecamatan Batang ada perkawinannya tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan mahalnya untuk pengurusan perkawinan. Dan ada pula yang belum nikah tetapi mereka telah mempunyai kutipan akta nikah (tidak tercatat).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku-suku menurut jenisnya masing-masing. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan Allah berbeda-beda, baik fisik, maupun sifat dengan berbagai karakter sendiri-sendiri. Hal ini mengingatkan kepada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. Al-Hujurat 49:13)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka berhubungan dan saling mengenal satu sama lainnya. Hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam suatu bentuk perkawinan.

"Perkawinan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dan calon isteri dengan lafal nikah tazwij atau lafal lain yang semakna dengan keduanya".¹

¹ Syaikh Hasan, Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 3

Perkawinan merupakan masalah penting, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar. Sebab setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Dengan perkawinan manusia mempunyai keturunan dan kelangsungan hidup. Dengan perkawinan kedudukan seorang akan berubah menjadi suami-isteri.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus (bagi yang mampu melakukan perkawinan) dilaksanakan menurut ajaran Islam sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Tujuan utama dari perkawinan adalah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga tetap dapat terjaga. Lafal ijab dan kabul yang diucapkan saat berlansungnya perkawinan mempunyai makna yang dalam dan menempatkan posisi perkawinan ini sebagai ikatan yang paling suci dan kuat.

Dikatakan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena dilakukan hanya sekali seumur hidup. Oleh sebab itu agar seorang suami tidak melakukan pernikahan kedua kalinya tanpa sepengetahuan isteri pertama maka perlu adanya suatu akta yang menyatakan bahwa ia pernah melakukan akad nikah sebelumnya dengan isteri pertama. Sehingga tidak terjadi

penipuan yang akan berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbooks*) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.² Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat ini penting sekali hubungannya dengan perbuatan hukum.³

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ini berbeda dengan ayat 1 yang didalamnya penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan pasal 3 dinyatakan:

1. Setiap orang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

² Wantjik, Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 15

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan keterangan Camat atas nama Bupati kepala daerah.

Dalam hal ini secara tekstual dapat dipahami bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat yang resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan syahnya suatu perkawinan, Undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, demikian juga fiqih. Di Indonesia terdapat dua instansi/ lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian. Pertama, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), dan kedua, Kantor Catatan Sipil untuk yang melakukan perkawinan bukan secara Islam.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk, harus dicatat seperti: kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan erat dengan waris-mawaris, sehingga

perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan atas dasar pemikiran itu, terlihat betapa pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan.⁴

Kebutuhan akan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidzan), perkawinan dan lebih lagi untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan yang berhak untuk mendapatkan Akta Nikah adalah suatu perkawinan yang sah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah demikian juga halnya dengan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas.

Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Terlebih lagi pada masa modren ini, bukti otentik terhadap suatu perbuatan hukum sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia menciptakan masyarakat yang adil, makmur, tentram, damai, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini senada dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang ini masih ada yang tidak memberitahukan dan melaporkan sehingga perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

⁴ Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107

Pencatatan perkawinan adalah 1000 jumlah penduduk, terdapat 30 peristiwa pernikahan setiap bulan di KUA Kecamatan Batang Kapas. Pada tahun 2009 terdapat 360 peristiwa perkawinan yang terdata di KUA Batang Kapas. 360 pasang peristiwa dibagi 12 bulan sebanyak 30 pasang peristiwa yang perkawinannya terdaftar dan 17 pasang peristiwa perkawinan yang tidak terdaftar.⁵

Masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak berada dalam pengawasan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang dari 17 pasang peristiwa perkawinan yang tidak tercatat. Mayoritas tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dari penelitian pendahuluan/pengamatan sementara di Kecamatan Batang Kapas terlihat adanya indikasi bahwa ada warga yang perkawinannya, kutipan akta nikahnya yang tidak dicatatkan di KUA.

Melihat kepada fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Batang Kapas untuk itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: **"Pencatatan Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan"**

⁵ Kudun, Kepala Saksi Urusan Agama Islam Kantor Depag Painan, Wawancara Langsung, Tgl 3 maret 2010

⁶ Peristiwa yang tercatat didapatkan di KUA Batang Kapas dan yang tidak tercatat didapatkan dari informasi yang ditemukan dari toko masyarakat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas?
- 2) Apa saja kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas.
- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan/manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam khususnya dibidang perkawinan yakni

dalam peningkatan status pencatatan perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia.

2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai pertimbangan agar status pencatatan perkawinan lebih ditingkatkan sehingga memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a) Kerangka Teoritis

1. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.⁷

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan beratau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan skembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi mamfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa mudharat kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang-kadang membawa mamfaat kepada satu kelompok masyarakat

⁷ Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1986), h. 105

tertentu, tetapi mendatangkan mudharat kepada kelompok masyarakat yang lain.⁸

Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak, disebut " masalah mursalah." Misalnya menghimpun dan menulis al-Qur'an dalam satu mushaf. Baik nash dari al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memerintahkan dan tidak melarang hal itu. Tetapi karena perbuatan semacam itu sangat bermamfaat dan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin, maka apa yang telah dirintis oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain dalam masalah tersebut merupakan masalah mursalah. Demikian juga Surat Nikah yang diadakan oleh Pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara, bila tanpa bukti itu adalah merupaka masalah mursalah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari'at untuk diadakannya, tetapi biarpun demikian menandung kemaslahatan yang sangat bermamfaat.⁹

Membina rumah tangga tidak hanya memikirkan suatu kebaikan untuk suami isteri di dunia ini. Akan tetapi juga untuk kebaikan yang berada diluar dari pada itu seperti kebaikan anggota keluarga yang lain, kebaikan moral dan agama di samping itu juga untuk menghindarkan suatu

⁸ *Ibid*, h. 106

⁹ *Ibid*, h. 107

keburukan yang akan menimpa suatu keluarga, agama yang mencangkup kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰

2. Teori *sociological jurisprudence*

Teori yang dikembangkan oleh Eugen Erlich seorang ahli hukum Barat, sebagai teori hukum modern, teori ini dipakai oleh pembuat hukum dalam menganalisis antara sinkronisasi hukum dengan masyarakat, penulis memakai teori ini dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari penelusuran rangkaian sejarah dan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Batang Kapas.

Teori ini mempelajari tentang pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum kemasyarakatan. Eugen Erlich berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pihak lain. Menurutnya harus adanya keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "*living law and just law*".¹¹ Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut diperhatikan dalam pembuatan sebuah undang-undang agar undang-undang yang dibuat itu dapat berlaku efektif didalam kehidupan masyarakat adalah dengan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid II, h. 323

¹¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 45

memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.

Teori sociological ini senada dengan teori pragmatik legal realisme oleh Rescou Pond yang mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law is a tool of social engeneering*). Hukum berperan didepan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

b) Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan artian tentang maksud dari judul proposal untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi : " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari bahagia dan kekal adalah perkawinan yang bisa bertahan lama dalam kehidupan rumah tangga yang dibina mulai dari awal sampai akhir perkawinan.
2. Pencatatan Perkawinan adalah: yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai pencatatan perkawinan.

3. Masyarakat adalah : sekumpulan manusia yang saling " bergaul " dan suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.¹²
4. Islam adalah : agama yang hidup, terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan intelektual jutaan umat manusia.¹³
5. Jadi Masyarakat Islam adalah : Masyarakat islam itu bisa disamakan dengan masyarakat madani, berarti masyarakat madani itu bisa dikatakan dengan masyarakat yang berkualitas yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, jadi masyarakat madani itu merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.¹⁴

F. Metode Penelitian

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*),¹⁵ yaitu penelitian hukum untuk mengungkapkan bagaimana hukum yang diterapkan dalam praktik.¹⁶

¹² Rahadi Abdul Fatah, *Sosiologi Agami*, (Jakarta : CV. Titian Kencana Mandiri, 2004), h. 23

¹³ Syaikh Muhammad Abduh, *Islam Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6

¹⁴ Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara keseimbangan kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang dan bukan nafsu dan keinginan individu. Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, Cet I ,2000), h 241

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), h. 105

¹⁶ Vredenberg, *Metoda dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Granmedia, 1980), h. 34

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara yang dalam ini penulis dapatkan dari : Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang melakukan pendaftaran perkawinan dan masyarakat yang telah melakukan perkawinan yang tidak terdaftar.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur penunjang, dan yang ada di KUA setempat yang berhubungan dengan tesis ini.

2. Populasi, dan Sampel

a. Populasi

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Batang Kapas memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam penelitian ini penulis menetapkan di Kecamatan Batang Kapas yang memiliki persentasi yang paling banyak perkawinan yang tidak tercatat dibandingkan dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Populasi dari pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dari Kecamatan tersebut dalam tahun 2009 telah terjadi 360 pasang peristiwa perkawinan yang terdaftar dan 17 peristiwa perkawinan yang tidak terdaftar.

Sedangkan populasi dari petugas yang berwenang terdiri dari : 1). Kepala KUA, 2). Penghulu, 3). P3N.

b. Sampling

Untuk mengambil data pada objek penelitian, penulis lakukan purposive sampling, di Kecamatan Batang Kapas memiliki persentase yang sama dalam pengambilan data. Sampling terhadap pemahaman masyarakat pada pencatatan nikah di kecamatan yang akan diteliti penulis menetapkan, mewawancarai sebanyak 30 peristiwa yang tercatat dari 360 peristiwa dan 3 peristiwa yang tidak tercatat dari 17 peristiwa. Sedangkan sampling dari petugas yang berwenang orang yang terdiri dari : 1). Kepala KUA terdiri 1 (satu) orang, 2). Penghulu terdiri 1 (satu) orang, 3). Petugas yang tidak berwenang sebanyak 4 (empat) orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari bahan-bahan tertulis tentang pendaftaran perkawinan, seperti surat model NA, akta nikah, dan sebagainya.

b. Wawancara

Cara ini penulis lakukan dengan berhadapan langsung dengan orang-orang yang memberikan data-data yang akan berkenaan dengan penelitian ini

melalui pertanyaan-pertanyaan. Adapun unsur-unsur yang penulis wawancarai terdiri dari :

1. Masyarakat yang perkawinannya terdaftar

Penelitian yang penulis lakukan di kecamatan Batang Kapas, penulis menetapkan, mewawancarai sebanyak 30 pasang peristiwa perkawinan yang terdaftar.

2. Masyarakat yang perkawinannya yang tidak terdaftar

Di Kecamatan Batang Kapas penulis menetapkan mewawancarai sebanyak 3 pasang peristiwa yang tidak terdaftar dari 17 pasang peristiwa.

3. Pegawai yang berwenang

a. Kepala KUA terdiri dari 1 orang

b. Penghulu, terdiri dari 1 orang

4. Petugas yang tidak berwenang terdiri dari 4 orang.

4. Pengolaan dan Analisis Data

Data primer langsung diperoleh dari informan tokoh masyarakat dan pegawai pencatat nikah di Kecamatan Batang Kapas. Data sekunder diperoleh dari literatur buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan disajikan dinilai dengan peraturan hukum yang ada, pandangan para ahli dan logika agar dapat diambil kesimpulan secara relevan. Tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah. Terdapat dalam surat Ar-Ra'du ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".

Islam juga mengatakan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepada mereka jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kesulitan.

Yang dimaksud dengan Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "mitsaaqan qhalizan" untuk mentaati Perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara suami isteri. Apabila akad nikah telah sah maka disaat sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami isteri, maka akan timbul pula akibat hukumnya bagi suami isteri berupa hak dan kewajiban dalam rumah

tangga.¹ Bahkan perkawinan itu salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga keturunan. Keturunan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, serta pengenalan itu akan menjadikan jalan buat bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Aqad nikah merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan antara suami isteri dan keturunannya bahkan antara dua keluarga. Pergaulan antara suami isteri yang kasih mengasihi akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari dua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam urusan tolong menolong untuk kebaikan.

Selain dari pada itu perkawinan seseorang akan terhindar dan terpelihara dari kekuasaan hawa nafsu. Seperti sabda rasulullah yang artinya;

"hai manusia-manusia, barang siapa yang mau diantara kamu serta berkeinginan handak kawin, hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang-orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syawat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia berpuasa. Karena dengan kepuasan hawa nafsu akan perempuan akan berkurang".

Dalam al-Qur'an surat An-nisaa memberikan petunjuk yang artinya sebagai berikut; "bahwa perkawinan itu adalah perjanjian suci yang kuat".

2. menurut UU No. 1/1974

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1/1974 disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi:

¹ Nazar Bakhri, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Padang : IAIN Press, 1999), h. 52

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas, bahwa yang melakukan perkawinan dari masing-masing pihak terkandung maksud dengan pertujuan untuk hidup bersama secara abadi, dengan mematuhi hak-hak dan kewajiban untuk mencapai keluarga yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Agama).

Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya dengan ikatan saja tetapi harus sejalan kedua-duanya. Suatu ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan kata lain disebut dengan hubungan materi ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi masyarakat. Ikatan bathin merupakan hubungan tidak formil, sesuatu ikatan yang tidak bisa dilihat karena tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena kalau tanpa ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Terjadinya ikatan lahir merupakan pondasi yang kuat dalam membina dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut UU No. 1/1974, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria (homo seksual), semuanya dilarang UU dan Agama.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

a. Mematuhi perintah Allah dan Rasulnya

Nikah merupakan salah satu perintah agama yang ditujukan kepada umat Islam, bagi yang mampu melaksanakannya.²

b. Mendapatkan keturunan yang sah

Sebagai hamba Allah dan umat Rasul maka manusia wajib untuk melaksanakan nikah, apabila ada kemampuan, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat : 1

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, nikah adalah jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

c. Memelihara dari perbuatan tercela

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak menikah tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembunuhan.³

d. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah dan bahagia penuh rasa kasih sayang. Dan juga menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak

² Ahmat Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-4, h. 97

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1997), h. 357

diizinkan, syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁴

1. Menurut Hukum Islam

Beberapa ahli dalam Hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, antara lain:

Soemiyati menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Syari'ah.³

Sedangkan Mahmud Yunus, merumuskan secara ringkas tujuan perkawinan menurut pemerintah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Filosof Islam Imam Gozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan membina rumah tangga yang menjadi basis pertamayang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang

⁴ Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh*, (jakarta persada media, 2003), h. 81

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Karisma, 1992), h. 72

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halaal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁶

Pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dibandingkan dengan beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: An-Nisa' ayat 1.....

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang Adam (laki-laki), dan dari padanya Allah menciptakan memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."⁷

Dalam ayat di atas, jelas bahwa menganjurkan perkawinan agar terwujud suatu keluarga yang besar yang mampu untuk mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Allah.

Hukum perkawinan dari sunnat akan berubah menjadi :

- a. Mubah (boleh), bagi orang yang mempunyai kesehatan dan biaya serta kemampuan yang cukup tetapi ia dapat mengendalikan hawa nafsunya.
- b. Wajib, bagi orang yang mempunyai kemampuan yang cukup, baik jasmani maupun rohani, baik materil untuk biaya kehidupan rumah tangga tetapi tidak kuat mengendalikan hawa nafsunya kemungkinan akan terjadi perbuatan dilarang/ perzinaan.

⁶Al-Gazali, *Mengungkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, tt), Cetakan Ke-5, Hal:13

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra 1971), h. 113

- c. Haram, orang yang mempunyai kemampuan kesehatannya tetapi tidak mampu untuk membiayai dan kawin dengan tujuan untuk menganiaya/ melakukan kejahatan bagi wanita yang dikawininya.
- d. Makruh, apabila seseorang tidak mampu membiayainya tetapi dia mampu mengendalikan dirinya/ nafsunya.⁸

2. Menurut UU No. 1/1974

Menurut UU No. 1/1974 tentang perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diserikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu perceraian hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak bisa ditempuh lagi. Untuk menjaga supaya perkawinan itu kekal dengan cara:

- a. Mempersulit pelaksanaan poligami (pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974)
- b. Mempersulit perceraian, pelaksanaan harus didepan Pengadilan Agama (bagi non Islam), pasal 63 UU No. 1/ 1974.

Selanjutnya ditegaskan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 22

tujuan perkawinan menurut konsepsi Hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 1/ 1974 dapat terlaksananya tujuan perkawinan menurut Hukum Islam.

Allah SWT menciptakan manusia dengan sempurna yang dilengkapi dengan beberapa perangkat. Salah satu perangkat tersebut adalah naluri untuk berhubungan dengan sesamanya, seperti kehendak untuk kemauan dan keinginan untuk memiliki sesuatu ataupun naluri untuk memiliki pasangan hidup. Adapun naluri untuk memiliki pasangan hidup harus dipenuhi dan itu adalah manusiawi. Pemenuhan naluri ini merupakan suatu aktifitas pengabdian manusia kepada sang khalik sebagai hambahnya.

Dalam hal ini Allah SWT telah memberikan petunjuk dengan jalan pernikahan agar dalam pemenuhan seksual ini dapat menimbulkan kecintaan yang berat kepada pasangannya dan tidak menjadi suatu benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ...

*Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu anak-anak dan harta yang banyak".*⁹

Dalam perkawinanitu bertujuan adalah untuk mencari kebahagiaan yang kekal dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila masing-masing pihak suami dan isteri bertanggung jawab dan tahu dengan hak dan kewajiban masing-masing yang berpedoman pada tuntunan ajaran agama.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77

2. Hikmah perkawinan

Perkawinan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk membentuk keluarga sebagai penerus dan generasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkawinan juga sebagai suatu jalan untuk menyalurkan naluri seksual seorang manusia. Penyaluran seperti ini merupakan suatu hal yang sangat wajar bagi manusia dalam menyalurkannya tersebut dibuatlah suatu prosedur tertentu untuk mengaturnya. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan terdapat beberapa hikmah di antaranya.¹⁰

1. Tersalurkan nafsu seksual dengan baik

Naluri seksual yang ada pada manusia merupakan naluri yang kuat, keras dan dituntut padanya usaha penyelesaiannya. Apabila tidak bisa dicari jalan penyelesaiannya maka akan banyak timbul permasalahan secara etika dan estetika dilihat dari kehidupan realita banyak dari orang yang tidak mampu menemukannya solusi dalam keluarga akan banyak menemukannya kegoncangan secara psikologis. Bentuk kegoncangan tersebut adalah seperti terkenanya penyakit stres dari berbuat perilaku yang menyimpang seperti untuk menyalurkan kehendak seksualnya ketempat-tempat terlarang atau yang sejenisnya.

Melihat dari kondisi di atas, jauh sebelumnya ajaran Islam telah memberikan solusi dengan jalan pernikahan. Dengan jalan pernikahan semua goncangan yang disebabkan oleh naluri manusiawi dapat ditemukan jalan yang terbaik dan alami. Selain itu banyak yang dapat ditemukan dalam pernikahan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), Cet. ke-7 Jilid VIII, h. 18

seperti menemukan jiwa yang tenang dan kebahagiaan badan menjadi terjaga dan hal-hal yang diharamkan untuk melihat dan keinginan diluar pernikahan.

2. Mendapat keturunan yang baik

Keturunan yang baik merupakan dambaan masing-masing suami isteri. Untuk mendapatkan keturunan tersebut Allah memberikan suatu solusi atau jalan keluar yaitu dengan melakukan pernikahan. Pernikahan akan membawa anak-anak tumbuh dalam kedamaian dan ketentraman dengan penuh kasih sayang yang datang dari kedua orang tuanya. Suasana lingkungan seperti ini akan memelihara kehidupan manusia dan dapat memelihara nasab. Dalam ajaran Islam persoalan nasab adalah suatu urusan yang sangat asensial sekali karena akan mempengaruhi kejiwaan kedudukan seorang anak nantinya sebagaimana yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang Adam (laki-laki), dan dari padanya Allah menciptakan memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

3. Menumbuhkan sifat kebakapan dan keibuan

Dalam kehidupan berumah tangga suami isteri harus saling memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban sama-sama terlengkapi maka akan timbul hubungan yang harmonis, bahagia dan kasih sayang. Apabila ditambah dengan kehadiran anak sebagai buah hati untuk

menyejuk dalam hubungan berumah tangga. Karena sama-sama berkeinginan untuk saling membahagikan si buah hati yang didambahkan dengan berbagai cara. Dengan adanya faktor-faktor pendorong seperti ini akan menambah kedewasaan emosional, dan menumbuhkan sifat kepapakan, keibuan pada diri suami dan isteri tersebut.

4. Menyadari tanggung jawab sebagai suami dan isteri

Manusia yang belum menikah mempunyai kehidupan yang cenderung tidak teratur, karena tidak ada tanggung jawab prinsipil yang menuntut berbuat banyak, lain halnya bagi mereka yang telah menikah pada umumnya mereka akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dengan rajin bekerja serta berusaha. Ini disebabkan oleh dorongan tanggung jawab yang disebabkan oleh tuntunan hidup. Sehingga apa yang dapat dikerjakan adalah mencari nafka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar tidak ada kekurangan dari segi materi maupun moril. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki); dan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (an-Nisa' : 34)

5. Adanya pembagian tugas antara suami dan isteri

Secara umum dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam kehidupan rumah tangga akan terdapat pembagian job kerja masing-masing yang seimbang. Ini dibutuhkan agar pemenuhan kebutuhan keperluan rumah tangga dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas ini dituntut kesadaran yang tinggi dari pasangan suami isteri tersebut agar keharmonisan tetap terjaga. Adapun tugas-tugas ini sesuai dengan kesepakatan dari pasangan tersebut.

Dalam realita sehari-hari tugas seorang isteri adalah menjaga kelestarian seisi rumah dan keluarga seperti mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak serta menyapkan suasana yang segar untuk suami di rumah. Karena rumah adalah tempat melepas dan rasa lelah bagi keluarga, sedangkan tugas seorang suami adalah berada dalam wilayah publik (di luar rumah) seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini adalah contoh job kerja yang pada umumnya berlaku ditengah masyarakat.

6. Menyambung hubungan silaturahmi

Banyak hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai dampak positif dari perkawinan, suatu realita bahwa perkawinan tidak hanya menghubungkan dan menyatukan dua insan saja, tetapi juga dapat menyatukan dua keluarga baik secara nasab, suku ataupun kampung yang berbeda. Dengan rasa persaudaraan yang kental, maka dengan sendirinya akan timbul hubungan silaturahmi yang baik dan diredhai Allah SWT.

C. Syarat-syarat Sah Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad¹¹ (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara pria dengan seorang wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah mawaddah dan rahmah).
- c. Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spritual.

Unsur-unsur baik yang merupakan syarat dan rukun perkawinan Islam itu adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan, sedangkan diantara mereka harus ada persetujuan yang bebas.
- b. Harus ada dua orang saksi yang agama Islam, laki-laki aqal baliqh, dan adil (tidak berdosa besar).
- c. Harus ada wali dari calon penganten wanita.
- d. Kewajiban membayar mahar, dari pihak penganten laki-laki kepada penganten wanita.

¹¹ Dept. Agama RI, *Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1986), h. 117

- e. Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dicatat dituliskan dengan adil.
- f. Harus ada pengucapan (shigat) 'Ijab dan Kabul' antara kedua pengantin itu.
- g. Secara resmi ijab dan kabul diperlakukan suatu lembaga lain yakni walimah dan l'lanun nikah artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah.

2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan.

Apabila calon penganten yang akan melaksanakan pernikahan itu berbeda agama, maka perkawinannya dilaksanakan dicatat sipil, bukan di Kantor Urusan Agama.

Dan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

1. Pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah apabila ia lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrasi. Ini berarti bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagai mana tersebut di atas.
2. Pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan.

Pendapat ini berdasarkan kepada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua dengan mendasarkan pada akibat hukum dari perkawinan khususnya mengenai kepastian hukumnya dengan tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut pendapat pertama, sebab UU No. 1/1974 ini lahir selain ingin mencapai keadilan juga menuju kearah adanya suatu kepastian.

Dengan demikian syahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi orang Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya dan harus didaftarkan bagi yang agama Islam ke P3NTR menurut UU No. 32/1974, bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil.

D. Akibat Hukum dari Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :

Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.

- a. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- c. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.

- d. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- e. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
- f. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- g. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- h. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

2. Menurut UU No. 1 tahun 1974

Menurut UU No. 1 tahun 1974, akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan adalah :

- a. Adanya hak dan kewajiban bagi suami maupun bagi isteri.
- b. Adanya penyatuan harta benda dalam perkawinan.
- c. Timbulnya hak ahli waris.
- d. Adanya kewajiban bagi suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isteri serta mengusahakan tempat tinggal bersama.

3. Menurut KUH Perdata

Sedangkan menurut KUH Perdata dari perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut :

- a. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri.
- b. Timbulnya ahli waris dalam perkawinan tersebut.
- c. Hubungan hukum yang timbul hanyalah dalam hal hubungan keperdataan saja.

E. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Pencegahan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat yang dicantumkan oleh UU dan agama, yaitu :

- a) Pihak-pihak yang belum cukup umur.
- b) Dalam perkawinan itu terdapat hubungan yang dilarang oleh agama.
- c) Seseorang masih terikat perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi.
- d) Bila calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- e) Apabila suami isteri yang bercerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f) Perbedaan agama.
- g) Tidak dipenuhi tatacara perkawinan seperti yang dimaksud oleh pasal 12 UU No. 1/1974.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan diberitahukan juga kepada pegawai pencatat nikah.

Begitu pula kepada calon-caalon mempelai diberitahukan mengenai pencegahan perkawinan itu. Pencegahan dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atau ditarik kembali oleh pemohon dengan diajukan ke

pengadilan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat adanya larangan menurut UU No. 1/1974, maka ia menolak melangsungkan perkawinan.

2. Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan oleh UU dan agama yaitu :

- a) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b) Pada waktu berlangsung perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami/isteri, hak suami isteri menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti atau salah sangka itu disadari, apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan batal.
- c) Seseorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- d) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang lain.
- e) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
- f) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagai mana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1/1974.
- g) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Apabila salah satu pihak masih terikat dirinya dalam suatu perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru dengan tidak mengurangi ketentuan :

- a. Apabila pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Kalau suami yang beristeri dari seseorang maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila dipenuhi alasan-alasannya.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau tempat tinggal kedua suami isteri.

Menurut pasal 37 PP No. 9/1975, pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan suatu perkawinan batal sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlangsung sejak saat berlangsung perkawinan. Sebelum vonis terakhir, suami isteri tetap tinggal serumah dan bergaul seperti biasa.

F. Larangan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 39 sampai dengan pasal 44 mengatur tentang larangan perkawinan :

Pasal 39 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita di sebabkan :

1. Karena pertalian Nasab,
2. Karena pertalian kerabat semenda,
3. Karena pertalian sesusuan.

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 : 1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah tidak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang isteri yang keempatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.

Pasal 44 : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

2. Menurut UU No. 1/1974

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 UU No. 1/1974 mengatur tentang larangan perkawinan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,
- b) Hubungan darah dalam garis menyamping antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c) Berhubungan semenda yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi/paman sesusuan,
- d) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang,
- e) Yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin,
- f) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain,
- a) Sesuatu yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh Undang-undang lain.

3. Menurut KUH Perdata (BW)

Dalam KUH Perdata larangan perkawinan dilakukan apabila :

- a. Adanya pertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah,
- b. Seorang laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan belum mencapai umur 16 tahun, kecuali adanya alasan yang penting,
- c. Melakukan perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama.

Dari uraian di atas, tentang larangan perkawinan ini penulis dapat memberikan tanggapan bahwa larangan perkawinan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang haram (tidak boleh) untuk dikawini. Menurut penulis Hukum Islam sangat bijaksana untuk melarang perkawinan karena adanya hubungan sedarah dalam arti hubungan yang dekat.

G. Tata Cara Perkawinan dan Kepentingan Pencatatan Perkawinan

1. Tata cara perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan bersifat nasional dan berlaku untuk semua golongan atau masyarakat Indonesia, termasuk bagi pemeluk agama Islam, maka bagi umat yang beragama Islam di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan, disamping harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam fiqh Islam, juga harus memenuhi ketentuan dan tata cara pelaksanaannya menurut Undang-undang yang berlaku.

Yang dimaksud dengan tata cara perkawinan adalah seluruh rangkaian kegiatan atau proses pelaksanaan perkawinan dari awal sampai tercatatnya perkawinan tersebut, yaitu penandatanganan akta nikah oleh masing-masing yang berhak. Adapun proses pencatatan perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat 1 sampai Ayat 13 PP no. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agamanya Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku, tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a) Kutipan Akta Kelahiran atas surat kapan lahir, surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan kepala desa.
 - b) Persetujuan calon mempelai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - c) Izin tertulis orang tua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun atau izin pengadilan dalam hal ada perbedaan

pendapat antara kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 5 Undang-undang No. 1/1974.

- d) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1/1974.
- e) Surat izin dari pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku baginya, jika ia salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- f) Surat keterangan pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarga negaraan asing. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai yang dimaksud Undang-Undang atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) PP ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri mereka terlebih dahulu.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10, Tata Cara Perkawinan

- 1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 PP ini.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 PP ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang mengahidiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 12 Tentang Akta Perkawinan

- a) Nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman.kediaman.
- b) Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c) Izin sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) Undang-undang.
- d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- e) Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang.
- f) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Mentri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata.
- g) Perjanjian perkawinan apabila ada.
- h) Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- i) Nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepala suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

2. Kepentingan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan pencatatan nikah sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat atau diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946. UU No. 22 /1946 ini adalah Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan nikah, thalaq dan rujuk (NTR) bagi umat Islam, yang pada mulanya untuk penduduk pulau Jawa dan Madura. Kemudian setelah keluarnya UU No. 32 Tahun 1954, barulah Undang-undang tersebut diberlakukan untuk seluruh wilayah negara kesatuan RI.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 : "nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan : " barang siapa yang melakukan aqad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada pasal 1 atau wakilnya didenda sebanyak Rp 50.000.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut adalah setiap nikah yang dilakukan harus di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, sedangkan mengenai pencatatannya merupakan kewajiban bagi pegawai yang mengawasi nikah itu, tapi bukanlah merupakan suatu ketentuan dalam perkawinan. Oleh sebab itu banyak umat Islam telah nikah tetapi tidak mempunyai surat nikah, kecuali sebagian kecil saja. Hal ini disebabkan karena pencatatan

nikah bukanlah merupakan suatu ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1946.

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1/1974 yang menghendaki bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Penjelasan umum UU No. 1/1974 No. 4 (b) menyatakan : " Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya : kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 9/1975 menerangkan dalam pasal 2 ayat 1 : " bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Thalak dan Ruju'. Lebih lanjut bila dihubungkan dengan bunyi pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa : " Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum" (pasal 6 ayat 2 KHI). Selanjutnya : " Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah" (pasal 7 ayat 1 KHI).

Berdasarkan bunyi ketentuan dan pokok perundangan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-undang memandang perkawinan itu merupakan

salah satu peristiwa yang bersejarah bagi kehidupan seseorang sebagaimana peristiwa lainnya, seperti peristiwa kelahiran dan kematian. Oleh sebab itu diperlukan catatan yang rapi yang merupakan alat bukti yang berguna, tidak saja bagi dirinya tetapi sangat penting makna dan artinya bagi anak-anak dan keturunannya di belangan hari.

Bila dikaitkan dengan peristiwa lainnya, maka perkawinan bukan saja merupakan hal yang bersejarah bagi kehidupan seseorang, tetapi juga membolehkan perbuatan haram menjadi halal, yaitu halalnya bergaul antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri menurut aturan agama yang dianutnya. Disisi lain perkawinan juga dapat merubah status seseorang, baik dari segi sosial maupun dari segi norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Begitu juga akibat hukum yang ditimbulkannya yang menyangkut berbagai masalah dan aspek kehidupan.

Dari keterangan di atas dapat penulis pahami bahwa kepentingan pencatatan menurut Undang-undang yang berlaku semakin jelas jika dilihat dari sudut kehendak hukum dan perundangan itu sendiri. Dimana hukum merupakan hajat manusia karena butuh kepada ketertiban, keamanan, perlindungan, terutama pada hak-haknya sebagai makhluk yang tidak lepas dari hidup bermasyarakat. Hukum menghendaki keadaan yang serba tertib dan teratur, oleh sebab itu perkawinan yang tercatat akan menimbulkan dampak positif yang menciptakan tertib administrasi dan tertib hukum ditengah-tengah masyarakat.



BAB III

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN BATANG KAPAS PESISIR SELATAN

A. Pengurusan Izin Nikah

Kebiasaan prosesi perkawinan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari awal penjajakan sampai pada proses perkawinan sama halnya dengan prosesi perkawinan di Minangkabau. Kegiatan awal dari sebuah perkawinan apabila menjadi urusan keluarga disebut dengan *maresek*.

Namun kegiatan ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutkan dengan *marisiak*, ada juga menyebut dengan *marasok* sesuai dengan istilah daerah masing-masing. Di Kecamatan Batang Kapas istilah ini disebut "*manapiak bandua*". Namun arti dan tujuannya sama yaitu melakukan penjajakan pertama karena di minang kabau sering melakukan penjajakan pertama ini adalah pihak keluarga perempuan. Dalam kegiatan ini tidak harus ayah dan ibu atau dari anak perempuan yang langsung datang, tetapi boleh mengutus orang yang sudah berpengalaman dalam urusan tersebut.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah pemuda yang dituju sudah punya keinginan untuk menikah dan apakah mau dijodohkan dengan perempuan yang juga ingin berumah tangga. Pada kedatangan awal ini belum langsung dijawab oleh orang tua sang pemuda, karena terlebih dahulu keluarga laki-laki berkumpul bahwa ada yang *bakandak*.¹

¹ Bidin, *Tokoh Adat Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2010

Awal dari prosesi pendaftaran dan pencatatan terhadap perkawinan akan dimulai apabila kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki telah menyepakati prosesi peminangan dan telah menetapkan hari pernikahan.

Awal dari prosesi pendaftaran dan pencatatan terhadap perkawinan dimulai dengan pengurusan Surat Keliling.² Surat keliling ini merupakan surat pernyataan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh kepala kampung daerah-daerah yang bersangkutan.

Pengurusan Surat keliling ini diberikan tanggung jawab pada mamak kaum yang bersangkutan, penyerahan ini atas kesepakatan yang dilakukan ketika acara minum kopi. Semua pengurusan merupakan tanggung jawab mamak kaum, sedangkan pihak yang melakukan resepsi perkawinan hanya diberikan kewajiban untuk menanggung semua biaya pengurusan surat keliling sampai terdaftar di KUA.

Ninie Mamak, membuat Surat Edaran Kehendak Nikah terdapat di lampiran 4 dengan tujuan supaya kepenakannya nikah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yang isinya adalah kami yang bertanda tangan dibawah ini pihak-pihak yang terkait dengan rencana akad nikah dua orang calon suami isteri. Adalah anak yang dilahirkan dari orang tua kedua pasangan yang bersangkutan.

² Surat Keliling adalah *Surat Keterangan untuk Nikah yang dinyatakan oleh calon penganten yang diketahui juga oleh kedua orang tuanya. Dalam Surat Keliling ini juga diketahui oleh mamak kaum, mamak adat serta Kepala Kampung. Idun, Mamak Kaum dan Mamak Adat, Wawancara Langsung, 2 Februari 2010*

Dimana kami orang tua dari pasangan yang bersangkutan tersebut di atas dengan disetujui oleh Penghulu dan Mamak kedua belah pihak menyetujui dan mendukung akad nikah pasangan yang dimaksud.

Sepanjang pengetahuan kami tidak ada halangan dan rintangan bagi kedua pasangan untuk melangsungkan akad nikah baik menurut agama Islam, adat istiadat maupun menurut Undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikianlah Surat Edaran Kehendak Nikah ini kami tanda tangani bersama dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dan intimidasi dari pihak manapun jika terjadi kesalahan dikemudian hari.

Surat Edaran Kehendak Nikah ini ditujukan kepada Wali Nagari.

Wali Nagari, Wali Nagari memberi N1, N2, N4.

- N1 adalah surat keterangan untuk nikah.
- N2 adalah surat keterangan asal usul.
- N4 adalah surat keterangan orang tua.

Tujuan wali nagari memberikan N1, N2, N4 supaya nikahnya tercatat dan terdaftar di dalam akta nikah.

Dan Wali Nagari memberi surat persetujuan kepada KUA. KUA mengeluarkan N3 yaitu surat persetujuan mempelai / nikah.

Jika calon suami atau isteri belum mencapai umur maka KUA mengeluarkan N5 yaitu surat izin orang tua.³

³ Kudun, Penghulu, Wawancara Langsung, Tuik, 9 Maret 2010

KUA menerima N1, N2, N4 dari wali nagari maka KUA menyalinkan ke N7 yang isinya adalah pemberian tahuan kehendak nikah yang akan melangsungkan pernikahan antara suami dan isteri pada hari, tanggal, pukul dengan maskawin dibayar tunai, bertempat di...

Dan dilampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul. , model N2
3. Surat Keterangan Mempelai. , model N3
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4

Setelah selesai surat izin dari KUA untuk nikah maka kedua mempelai melakukan persidangan nikah di KUA, selanjutnya pelaksanaan nikah dapat dilakukan oleh kedua mempelai apabila telah diselesaikan dari semua yang di atas. Setelah siap nikah barulah bisa suami isteri dapat memperoleh kutipan akta nikah.

KUA membuat akta nikah untuk bukti bahwa kedua mempelai sudah melakukan pernikahan yang sah, dari N1-N7 salinannya dimasukkan kedalam Daftar Pemeriksaan Nikah.

Jika akad nikah diperiksa dan dihadiri Pembantu PPN atau dilangsungkan di luar balai nikah, jelaskan saat dilangsungkannya akad nikah : hari, tanggal, bulan tahun dan pukul.

Tujuan KUA untuk mencatat dan mendaftarkan pernikahan ini adalah supaya mempelai laki-laki dan mempelai wanita dapat terjaminnya

pernikahan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah, misalkan kedua mempelai ini pergi ke hotel maka yang diminta di hotel tersebut adalah kutipan akta nikah, barulah bisa memasuki hotel tersebut karena sudah ada bukti pernikahan yang sah.

B. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Yaitu pernyataan seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan baik secara lisan maupun secara tulisan, yaitu sekurang-kurangnya 10 hari Kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan perkawinan dapat disampaikan oleh orang tua mempelai yang terdapat dalam N7 dilampiran 11 yang isinya adalah tanda tangan dari PPN/Pembantu PPN dan calon mempelai/wali/wakil wali.

C. Pemeriksaan Nikah

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang mengahidiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
6. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pemeriksaan kehendak nikah terdapat pada NB lampiran 12 yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, pembantu PPN, PPN/Penghulu.

D. Pengumuman Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah segala persyaratan dipenuhi serta tidak terdapat halangan perkawinan, baru pencatat membuat pengumuman dengan menempelkan dalam bentuk yang telah ditentukan pada kantor-kantor pencatat. Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dengan membuat hal ihwal calon mempelai. Pengumuman kehendak nikah terdapat pada NB lampiran 13.

Pengumuman adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan, apabila demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke-10 pengumuman tersebut diumumkan. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi.

Saat setelah berlansungnya aqad maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disediakan dan kemudian diikuti oleh dua orang saksi, wali nikah, jika yang melansungkan perkawinan itu beragama Islam, kemudian disusul oleh PPN yang bersangkutan. Dengan telah selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Setelah perkawinan tercatat secara resmi, barulah PPN mengeluarkan akta nikah yaitu rangkap dua, lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatat nikah (KUA), dan lembar kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pegawai pencatat tersebut, dan kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipannya.

Akta perkawinan itu adalah sebuah daftar besar yang memuat antara lain sebagai berikut :

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman.
2. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Dispensasi
4. Izin pengadilan
5. Perjanjian perkawinan apabila ada.
6. Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
7. Nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Perkawinan dianggap sah apabila cukup syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah), kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan suatu hambatan Undang-undang Perkawinan.

Masyarakat Islam Kecamatan Batang Kapas dalam pelaksanaan pengesahan perkawinannya adalah apabila seseorang itu dinyatakan sah menikah secara agama, maka tahap selanjutnya juga mendapatkan pengakuan pengesahan perkawinan menurut hukum kenegaraan. Dimana menurut UU negara, perkawinan mesti dicatatkan. Memenuhi prosedur perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan berarti sudah dianggap sah perkawinannya.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu diatur dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Untuk memperoleh mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya ;

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

1. Minimal dua orang saksi
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Antara ijab dan qabul bersambungan misalnya :

Wali melafazkan...

"Aku nikahkan anak aku Andun binti Aziz dengan kamu Kudun dengan maharnya seperangkat alat shalat tunai"...karena Allah SWT.

Mempelai laki-laki menjawab...

"Aku terima menikahi anak bapak Andun binti Aziz dengan maharnya seperangkat alat shalat tunai"...karena Allah SWT.

4. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
5. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram, haji/umroh
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tetapi yang penulis teliti ada perkawinan itu dianggap sah padahal perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah

⁴ Abrial, Pegawai Pencatat, KUA Kecamatan Batang Kapas, Wawancara Langsung 27 Februari 2010

ditentukan, masyarakat tersebut untuk mendapatkan kutipan akta nikah dengan cara membeli kutipan akta nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan masyarakat ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah ini adalah untuk mempermudah dalam urusan seperti mempermudah administrasi untuk pembuatan paspor

Edi⁵ mengatakan bahwa " *kami dapek melaksanakan perkawinan yang model iko, apobilo indak kami laksanakan, masyarakat takuik akan terjadinya perzinaan. Dari pado manimbulkan fitnah lebih baik mereka dinikahkan.* " Demikianlah alasan yang diberikan oleh pelaksana tersebut.

Masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak berada dalam pengawasan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang 3 dari 17 orang peristiwa perkawinan yang tidak tercatat, mayoritas tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Menyatakan bahwa perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama, akan tetapi mereka masih melaksanakan pencatatan tidak melalui prosedur Pengadilan Agama.

Andun⁶ menyatakan " *kami bukan pegawai jadi mengapa harus sulit-sulit dan mengeluarkan biaya banyak pergi ke Pengadilan Agama untuk bercerai, secara agama perceraian kami telah sah. Ketika kami tidak diterima oleh petugas yang berwenang karena kekurangan syarat, perkawinan kami tetap dilaksanakan walaupun dilaksanakan oleh petugas*

⁵Edi, Pelaksana Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Desa Tuik IV Koto Mudik, (Petugas Ilegal), Wawancara Langsung, 9 Maret 2010

⁶Andun, Pengantin Perkawinan Yang Tidak Tercatat, Pada Desa Tuik IV Koto Mudik, Wawancara Langsung, 9 Maret 2010

yang tidak berwenang". Demikianlah komentar yang diberikan oleh orang-orang yang perkawinan mereka yang tidak tercatat.

Sebagai akibat dari pemikiran terhadap sahnya perkawinan apabila telah memenuhi ketentuan Kitab-kitab fiqh klasik, menimbulkan terjadinya penolakan yang tidak berada dalam pengawasan dari petugas pencatatan nikah yang berwenang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukanlah hambatan dan tantangan pencatatan nikah. Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan yang mereka lakukan tidak dibawah pengawasan petugas pencatatan nikah yang berwenang adalah:

1. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan dan tujuan masih sangat kurang.
2. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan masalah pribadi. Sehingga tidak perlu campur tangan dari pemerintah serta disisi yang lain pengurusan persyaratan perkawinan merepotkan dan menggunakan biaya yang banyak.
3. Terjadinya perceraian secara agama, sehingga perlu adanya akta cerai sebelum melangsungkan perkawinan yang kedua.
4. Tidak ada surat izin dari istrinya atau Pengadilan Agama bagi orang yang dimaksud untuk beristri lebih dari satu orang.

Sedangkan dari tokoh masyarakat,⁷ masih ada di antara mereka yang masih mau mensahkan perkawinan yang tidak berada dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁷Alif, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi Tuik, 10 Maret 2010

Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan di Indonesia senantiasa dan selalu dilaksanakan dan dijadikan program tahunan pada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan.⁸

Hal itu tetap direalisasikan oleh Kepala KUA beserta jajarannya untuk tetap mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan dalam berbagai macam program kerja. Akan tetapi sampai saat ini masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan terjadinya mayoritas masyarakat Islam masih berpegang teguh pada fiqh klasik. Perkawinan itu sah apabila ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik telah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

Sosialisasi ini dilakukan agar UU dan Peraturan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga perkawinan yang mereka laksanakan diberitahukan dan dilaporkan pada petugas yang berwenang agar dapat dicabut sesuai dengan aturannya. Apabila kesadaran terhadap hukum itu terjadi, maka kaedah hukum akan tercapai dalam rangka mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat.

⁸Rizal, *Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2010

F. Penandatanganan Akta Nikah

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri mereka terlebih dahulu. Dan Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan. Penandatanganan akta nikah terdapat di Model N lampiran 14.

G. Penyerahan Kutipan Akta Nikah

Sesudah dilaksanakannya perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Penyerahan kutipan akta nikah terdapat di Model NA dilampiran 15.

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁹ Tetapi yang penulis lihat di dalam masyarakat kecamatan Batang Kapas ada terjadi beberapa peristiwa yang perkawinan yang tercatat sebanyak 30 pasang peristiwa, perkawinan tidak tercatat sebanyak 3 pasang peristiwa dalam satu bulan.

⁹Amri, Pegawai Pencatat, KUA Batang Kapas, Wawancara Langsung, 29 Februari 2010

Tabel 1

Perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan

No	Perkawinan bulan Desember 2009	Banyak (orang) Perbulan	Persen
1	Perkawinan yang tercatat	30	3 %
2	Perkawinan yang tidak tercatat	3	0.003 %

Sumber di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas¹⁰

Masyarakat yang perkawinannya terdaftar, pada perkawinan yang tercatat dari jejak/perawan terdapat 30 orang yang menyatakan perkawinannya tercatat. Pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum dari pencatatan perkawinan dan sanksi yang akan didapatkan jika tidak mendaftarkan perkawinan yang mereka laksanakan. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada tabel.

Tabel 2

Kapan masyarakat mulai mengetahui aturan pencatatan perkawinan dan alasan mendaftarkan perkawinan mereka

No	Uraian	Jumlah orang	Persen
1.	Apakah pentingnya perkawinan itu dicatat?		
	a. Jejak / perawan		
	1. Pentingnya dicatat	30	3 %
	2. Tidak begitu penting	0	0 %
	3. Tidak tahu	0	0 %
	b. Duda / Janda		
	1. Pentingnya dicatat	30	3 %
	2. Tidak begitu penting	0	0 %

¹⁰ Emi, Pegawai Kantor Urusan Agama Batang Kapas, 29 Februari 2010

	3. Tidak tahu	0	0 %
2.	Sejak kapan masyarakat mengetahui aturan pencatatan perkawinan ?		
	a. Jejaka / perawan		
	1. 1 sampai 5 tahun yang lalu	20	2 %
	2. 6 sampai 10 tahun yang lalu	6	0,006 %
	3. lebih 15 tahun yang lalu	4	0,004 %
	4. Tidak tahu	0	0 %
	Duda / janda		
	1. 1 sampai 5 tahun yang lalu	15	1,5 %
	2. 6 sampai 10 tahun yang lalu	8	0,008 %
	3. lebih 15 tahun yang lalu	7	0,007 %
	4. Tidak tahu	0	0 %
3.	Apakah alasan masyarakat mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan ?		
	a. Jejaka / perawan		
	1. Untuk mendapatkan buku nikah	25	2,5 %
	2. Untuk pengurusan akta kelahiran	22	2,2 %
	3. Persyaratan mencari kerja / paspor	3	0,003 %
	4. Tidak tahu	0	0 %
	b. Duda / janda		
	1. Untuk mendapatkan buku nikah	25	2,5 %
	2. Untuk pengurusan akta kelahiran	22	2,2 %
	3. Persyaratan mencari kerja / paspor	3	0,003 %
	4. Tidak tahu	0	0 %

Sumber : masyarakat Batang Kapas ¹¹

Alasan yang mereka kemukakan di atas menyebabkan mereka mendaftarkan perkawinan yang mereka laksanakan, sehingga perkawinan

¹¹Endi, dkk Masyarakat yang Perkawinannya Terdaftar, Wawancara Langsung, 9 Maret 2010

yang mereka laksanakan berada dibawah pengawasan pihak yang berwenang dari jejak/perawan supaya dapat jaminan hukum.

Pentingnya perkawinan itu dicatat dari jejak / perawan, masyarakat menganggap bahwa penting perkawinan itu dicatat karena mempunyai jaminan hukum, ada 30 orang yang mengatakan pentingnya perkawinan itu dicatat, 0 (nihil) mengatakan perkawinan itu Tidak begitu penting, 0 (nihil) mengatakan Tidak tahu. Dan begitu juga Duda / Janda masyarakat menganggap bahwa penting perkawinan itu dicatat karena mempunyai jaminan hukum, ada 30 orang yang mengatakan, dan , 0 (nihil) mengatakan perkawinan itu Pentingnya dicatat, 0 (nihil) mengatakan perkawinan itu Tidak begitu penting dan 0 (nihil) mengatakan perkawinan itu Tidak tahu.

Masyarakat mengetahui aturan pencatatan perkawinan Jejak / perawan 1 sampai 5 tahun yang lalu sebanyak 20 orang, 6 sampai 10 tahun yang lalu sebanyak 6 orang, lebih 15 tahun yang lalu sebanyak 4 orang, dan 0 (nihil) yang Tidak tahu. Dan begitu juga dengan Duda / janda 1 sampai 5 tahun yang lalu sebanyak 15 orang, 6 sampai 10 tahun yang lalu sebanyak 8 orang, lebih 15 tahun yang lalu sebanyak 7 orang, dan 0 (nihil) yang tidak tahu.

Masyarakat mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan Jejak / perawan Untuk mendapatkan buku nikah sebanyak 25 orang, untuk pengurusan akta kelahiran sebanyak 22 orang, persyaratan mencari kerja / paspor sebanyak 3 orang, dan 0 (nihil) yang tidak tahu. Dan begitu juga dengan duda / janda untuk mendapatkan buku nikah sebanyak 25 orang, untuk pengurusan akta kelahiran sebanyak 22 orang, persyaratan mencari kerja / paspor sebanyak 3 orang, dan 0 (nihil) yang tidak tahu.

Dan begitu juga dengan masyarakat yang perkawinannya tidak terdaftar dari jejak/perawan terdapat 3 dari 17 orang, pemahaman masyarakat ini terhadap hukum dari pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 3
Perkawinan Yang Tidak Tercatat

No	Uraian	Jumlah orang	Persen
1.	Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum pencatatan perkawinan?		
	a. Jejak/perawan		
	1. Mengetahui	3	0,003 %
	2. Kurang mengetahui	0	0 %
	3. Tidak mengetahui	0	0 %
	b. Duda/janda		
	1. Mengetahui	3	0,003 %
	2. Kurang mengetahui	0	0 %
	3. Tidak mengetahui	0	0 %
2.	Apakah masyarakat mengetahui adanya sanksi bila tidak mendaftarkan perkawinan yang dilaksanakan ?		
	a. Jejak/perawan		
	1. Mengetahui	3	0,003 %
	2. Kurang mengetahui	0	0 %
	3. Tidak mengetahui	0	0 %
	b. Duda/janda		
	1. Mengetahui	3	0,003 %
	2. Kurang mengetahui	0	0 %

3. Tidak mengetahui	0	0 %
---------------------	---	-----

Alasan mereka yang mengemukakan di atas, menyebabkan mereka tidak terdaftar perkawinannya ada yang mengatakan sebanyak 3 orang dia berpendapat bahwa mereka tidak mengetahui dasar hukumnya dan apa akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan.¹²

Petugas yang tidak berwenang atas pencatatan perkawinan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4
Petugas yang tidak berwenang

No	Uraian	Jumlah	Persen
1.	Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap mereka yang tidak mencatatkan perkawinan mereka ?		
	a. Jejak / perawan		
	1. Tidak ada aturan dalam agama	4	0,004 %
	2. Perceraian secara agama	0	0 %
	3. Biaya yang tinggi dan merepotkan	0	0 %
	4. Pernikahan adalah urusan pribadi sehingga tidak perlu campur tangan pemerintah.	0	0 %
	b. Duda / janda		
	1. Tidak ada aturan dalam agama	4	0,004 %
	2. Perceraian secara agama	0	0 %
	3. Biaya yang tinggi dan meraporkan	0	0 %
	4. Pernikahan adalah urusan pribadi sehingga	0	0 %

¹²Upik, dkk, *Masyarakat yang Perkawinannya Tidak Terdaftar, Wawancara Langsung*, 9 Maret 2010

	tidak perlu campur tangan pemerintah.		
2.	Apakah pencatatan nikah mengandung kemaslahatan?		
	a. Petugas yang berwenang		
	1. Sangat mengandung kemaslahatan	4	0,004 %
	2. Mengandung kemaslahatan	0	0 %
	3. Tidak mengandung kemaslahatan	0	0 %
	4. Tidak tahu	0	0 %
	b. Petugas yang tidak berwenang		
	1. Sangat mengandung kemaslahatan	4	0,004 %
	2. Mengandung kemaslahatan	0	0 %
	3. Tidak mengandung kemaslahatan	0	0 %
	4. Tidak tahu	0	0 %

Sumber : Petugas yang tidak berwenang¹³

Alasan yang mereka kemukakan di atas, menyebabkan mereka tidak mendaftarkan perkawinan yang mereka laksanakan, sehingga perkawinan yang mereka laksanakan tidak berada dibawah pengawasan pihak yang berwenang. Dari jejak/perawan 4 orang mengatakan bahwa pendaftaran perkawinan itu tidak ada aturan dalam agama.

Perkawinan Yang Tidak Tercatat

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Menurut penulis perkawinan yang tidak tercatat dalam pembahasan ini yaitu perkawinan yang dilakukan tidak menurut Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1974. berdasarkan pengertian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa setiap perkawinan

¹³Dedi, dkk, *Petugas Yang Tidak Berwenang, Wawancara Langsung*, 9 Maret 2010

yang dilakukan dengan tidak memenuhi atau melanggar dari ketentuan Undang-undang adalah tidak punya kekuatan hukum. Dengan memperhatikan bunyi pasal 22 Undang-undang No. 1/1974 " perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan." Termasuk juga syarat-syarat formil untuk melangsungkan perkawinan, karena menurut Undang-undang perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.¹⁴

Dalam penjelasan pasal 22 ini dijelaskan bahwa pengertian " dapat " pada pasal ini diartikan bahwa bisa batal atau bisa tidak batal, bila ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Apabila diperhatikan pasal 22 Undang-undang No. 1/1974 beserta penjelasannya tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi dan menuruti prosedur hukum yang berlaku, tidak mempunyai kepastian hukum. Hal ini sudah tentu tidak dapat menjamin kepada kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-undang No. 1/1974 pada hakikatnya adalah perkawinan yang tidak terdaftar di kantor pejabat yang berwenang, untuk itu masing-masing pihak suami isteri tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti atas perkawinan mereka yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut. Untuk lebih mudahnya

¹⁴Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), h. 92

dalam memahami persoalan ini, penulis mengemukakan bentuk-bentuk perkawinan yang tidak tercatat sebagai berikut :

- a. Perkawinan 'Urfi atau tradisional yaitu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta yang ada ditangan pencatat nikah, serta tidak disertai dengan merahasiakan kepada para saksi, perkawinan semacam ini diketahui juga oleh famili dan tetangga. Akad ini telah memenuhi syarat dan rukun yang dituntut untuk sahnya perkawinan dan akad tersebut tetaplah hak dan kewajiban, seperti hubungan antara suami dan kewajiban taat oleh isteri, nasab keturunan anak. Inilah akad syara' yang berlaku dikalangan umat Islam sampai waktu yang dekat. Suara imam cukup mengikat suami isteri untuk mengakui perkawinan tersebut dan tuntunan agama dan imannya seseorang.¹⁵

Perkawinan 'urf ini mirip sekali dengan perkawinan secara fiqih Islam, hanya saja tata caranya tidak menurut ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam perkawinan 'urf ini ada mengandung unsur kerahasiaan, karena perkawinan tersebut sengaja tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah. Perkawinan bentuk ini merupakan perkawinan yang sudah biasa dikalangan umat Islam Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang No. 1/1974 . Bahkan sesudah Undang-undang No. 1/1974 lahir kebiasaan ini masih banyak ditemukan ditengah-tengah masyarakat. Mereka berusaha menghindarkan diri dari sistim dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang tersebut,

¹⁵Muhammad Syaltuot, *Al-fatwa diterjemahkan oleh Bustami A. Gani es*, (Jakarta ; Bulan Bintang, ff), h. 60

karena mereka menilai berbelit-belit serta lama pengurusannya sehingga mereka mengambil jalan pintas yang mereka pentingkan hanyalah syarat materil saja dan mengabaikan syarat formilnya.

b. Perkawinan disebabkan kelalaian pegawai pencatat

Meskipun pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dilaksanakan di depan pegawai pencatat, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat dalam buku pendaftaran yang telah disediakan untuk itu, baik perkawinan itu didahului dengan pengumuman sebelumnya atau tidak, namun kenyataannya perkawinan tersebut telah dilangsungkan.

Namun kedua suami isteri tidak menerima kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa nikah merena telah tercatat, disebabkan tidak punya catatan sama sekali. Maka kejadian seperti ini disebabkan karena kelalaian pegawai pencatat itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan kehendak Undang-undang itu sendiri, karena Undang-undang menghendaki setiap peristiwa berlangsungnya perkawinan harus di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini PPN bagi yang beragama Islam harus mencatatnya dalam akta nikah (model A 1), untuk kemudian diberikan pada masing-masing suami isteri kutipan akta nikah (model A1 dan A 2).

c. Perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia

Yang penulis maksud dengan perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia adalah perkawinan yang terjadi di luar Indonesia (luar negeri)

seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang No. 1/1974 pasal 56 ayat 1 dan 2 :

Ayat 1 " Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia yang tidak ada ketentuan Undang-undang ini.

Ayat 2 " dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Penjelasan dari kedua ayat di atas tidak ada ditemui, baik dalam penjelasan Undang-undang maupun PP No. 9/1975. Namun demikian dapat dipahami bahwa menurut Undang-undang perkawinan yang dilakukan diluar negeri sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara tempat melangsungkan perkawinan itu, dan tidak melanggar ketentuan UU No. 1/1974 yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Seperti yang akan dilangsungkan tersebut ada memenuhi syarat-syarat perkawinan dan mengikuti tata caranya yang sangat penting lagi perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Setelah suami isteri kembali ke Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan mereka dalam jangka waktu 1 tahun paling lama harus didaftarkan pada kantor pencatat perkawinan ditempat atau wilayah mereka.

Adanya keharusan mendaftarkan kembali, bagaimana bila perkawinan itu tidak didaftarkan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apakah perkawinan mereka oleh Undang-undang tetap diakui keabsahannya dan tercatat. Hal yang demikian tidak ada ketentuan lebih lanjut aturan penjelasannya, apakah mungkin mereka termasuk kawin yang tidak tercatat. Menurut penulis masalah ini belumlah mempunyai kekuatan hukum yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap harta benda bila salah seseorang meninggal dunia apabila persoalannya diselesaikan menurut hukum yang berlaku (secara hukum).

Dengan demikian ada dua bentuk akhir dari perkawinan diluar negeri menurut kenyataannya :

- 1) Perkawinan yang tidak tercatat.
- 2) Perkawinan yang tidak tercatat (tidak didaftarkan)

2. Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan tersebut juga sejalan dengan kehendak hukum Islam. Adanya kesesuaian antara hukum Islam dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan suatu perkawinan. Dapat dipahami dengan mengemukakan beberapa alasan yang dapat digali baik dalam al-Quran maupun melalui sunnah Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah kamu penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimbalan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimbalan, maka hendaklah walinya mengimbalan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengikatnya.

Dan juga dalam Surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dalam hal ini ada persamaan yang ditunjuk oleh kedua ayat tersebut yaitu sama-sama berkenaan dengan masalah hubungan antara sesama, dengan kata lain perkawinan jika dilihat dari satu segi termasuk kepada muamalah. Kalau dalam masalah keharta bendaan yang diakadkan adalah harta itu sendiri sedangkan dalam perkawinan yang diakadkan adalah kehormatan. Adapun hal yang lebih penting lagi untuk pencatatan suatu perkawinan bila dibandingkan dengan pencatatan dalam transaksi jual beli. Dalam masalah transaksi jual beli pada dasarnya hanya berakibat hukum terhadap pihak yang melakukan perikatan tersebut. Lain halnya dengan perkawinan akibat hukum yang ditimbulkannya tidak terbatas terhadap akidah saja tetapi juga erat kaitannya dengan masalah keturunan, nasab anak dan masalah kewarisan serta masalah keperdataan lainnya.

Dengan demikian, diqiyaskan pencatatan perkawinan kepada pencatatan dalam masalah transaksi jual beli, karena adanya kemiripan antara ashal dan furu'. Ashal, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas. Ayat tersebut berkenan dengan masalah kehartaan (muamalah), 'illat yang terdapat pada ashal adalah untuk menghilangkan fitnah dan menghindari persengketaan dibelakang hari. Oleh sebab itu seruan yang terdapat dalam ayat tersebut menurut kebanyakan ulama adalah dalam bentuk sunnat. Demikianlah juga halnya dengan perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas dari satu segi juga termasuk ke dalam masalah muamalah. 'illat untuk mencatatnya sama dengan ashal yaitu sama-sama untuk menghilangkan fitnah dan menghindari persengketaan

dibelakang hari. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas, meliputi hukum kekeluargaan maupun hukum kewarisan serta akibat hukum lainnya. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas meliputi hukum kekeluargaan maupun hukum kewarisan serta akibat hukum lainnya.

Jadi bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dihubungkan secara sistematis antara al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas dengan surat an-Nisa' ayat 21, menurut penulis bahwa perkawinan menurut hukum Islam di samping harus memenuhi rukun dan syarat materil juga harus memenuhi syarat formilnya, yaitu dengan menulis atau mencatatnya dengan adil dan didaftarkan pada kantor pegawai yang berwenang untuk itu. Halnya saja pada masa Nabi belumlah ada semacam instansi tertentu yang sudah melembaga yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan suatu perkawinan semacam PPN yang bertempat di ibu kota, Kecamatan pada saat sekarang ini.

Disisi lain penulis melihat bahwa perkawinan dalam Islam itu ada tata caranya, setelah terpenuhi rukun dan syaratnya serta terhindar dari hal yang menghalanginya, maka Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk mengadakan pesta perkawinan (walimah), atau dengan memukul gendrang dan bunyi-bunyian lainnya serta menyebarkan berita perkawinan kepada masyarakat umum.¹⁶

Perkawinan yang tidak tercatat yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, tidak memiliki kekuatan hukum yang akan berimbas pada

¹⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1979), cet ke-8, h. 21

perbuatan hukum yang mereka lakukan dan anak keturunan mereka tidak diakui secara hukum. Di samping itu juga perkawinan yang tidak tercatat akan memberikan kemudharatan pada salah satu pihak dan apabila terjadinya konflik rumah tangga maka isteri dan anak-anak akan menerima mudharat yang lebih besar.





BAB IV

KENDALA YANG ADA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN BATANG KAPAS

PESISIR SELATAN

Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis peroleh bahwa ada masyarakat Islam Kecamatan Batang Kapas yang perkawinannya dan kutipan akta nikahnya yang tidak tercatat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu seorang penghulu yang bertugas sebagai pegawai pencatat nikah di Kecamatan Batang Kapas beliau menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedurnya mulai dari proses pencatatan perkawinan : Pemberitahuan kehendak nikah, penelitian, pengumuman, penandatanganan akta nikah dan penyerahan kutipan akta nikah.¹

Tetapi yang penulis teliti, masyarakat Kecamatan Batang Kapas masih ada perkawinannya yang tidak tercatat, dari populasi yang penulis dapat maka penulis mengambil sampel dari masyarakat yang perkawinannya tidak terdaftar sebanyak dua (3) orang perbulan, tiga orang ini perkawinannya tidak terdaftar dan akta nikah dan kutipan akta nikahnya telah diambil oleh orang yang memerlukan yaitu orang yang mau bepergian keluar negeri (malaysia) karena KUA setempat tidak memberikan kutipan akta nikah tersebut.

Namun kedua suami isteri tidak menerima kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa nikah mereka telah tercatat, disebabkan tidak punya catatan sama

¹Imam Kayo, *Penghulu, Wawancara Langsung*, Tuik 29 Februari 2010

sekali. Maka kejadian ini disebabkan karena kelalaian pegawai pencatat nikah itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan kehendak Undang-undang itu sendiri, karena Undang-undang menghendaki setiap peristiwa berlangsungnya perkawinan harus dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam ini PPN bagi yang beragama Islam harus mencatatnya dalam akta nikah (model A 1), untuk kemudian diberikan pada masing-masing suami isteri kutipan akta nikah (model A 1 dan 2).

Bila suami isteri tidak menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah seperti dijelaskan di atas, jelaslah pegawai pencatat nikah tidak mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga perkawinan itu tidak tercatat dalam buku catatannya tetapi penulis meneliti perbuatan ini disengaja supaya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.

Tujuan KUA untuk tidak mendaftarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada orang yang telah melakukan perkawinan yang sah dan telah diikuti sesuai dengan prosedur yang ada adalah supaya orang yang melakukan perkawinan yang sah dapat mengambil kutipan akta nikah tersebut apabila orang itu disaat telah membutuhkan kutipan akta nikah.

Apabila kutipan akta nikah yang tidak diambil oleh pihak yang telah melakukan perkawinan yang sah dalam jangka waktu yang lama maka kutipan akta nikah tersebut diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Misalnya : orang untuk bepergian keluar negeri (malaysia), tujuannya untuk mendapatkan kutipan akta nikah tersebut supaya dapat mempermudah dalam

pembuatan paspor untuk pergi keluar negeri dan bisa jadi jaminan hukum yang sama dengan orang luar negeri tersebut.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin pergi keluar negeri dan ingin mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan masyarakat di sana, maka salah satu caranya adalah mereka harus menikah dengan orang yang mempunyai "IC" (*Identification card*).² IC adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukan bagi warga setempat dan dapat pula dimiliki oleh warga negara asing yang telah berdomisili di negara tersebut selama 20 tahun, namun sejak tahun 1993 hal itu tidak berlaku lagi. Warga negara asing tidak bisa mendapat "IC" lagi meskipun mereka telah berdomisili di negara tersebut selama 20 tahun. Jadi, agar mereka mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan warga setempat, maka mereka harus menikah dengan orang yang sudah memiliki "IC", sehingga jaminan hukum mereka tetap ada meskipun mereka tidak mempunyai "IC".

Salah satu untuk mendapatkan kutipan akta nikah tersebut adalah dengan membeli kutipan akta nikah dari KUA setempat, yang mana kutipan akta nikah yang diberikan oleh KUA setempat adalah kutipan akta nikah yang tidak diambil oleh pihak yang telah melakukan perkawinan yang sah dalam jangka waktu yang lama. Pegawai KUA memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada orang yang membutuhkan (orang yang membuat paspor untuk keluar negeri) karena mereka beranggapan bahwa kutipan akta nikah itu tidak diambil oleh pemilik yang sah melakukan perkawinan. Dan pegawai tersebut

²IC adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukan bagi warga setempat (warga malaysia) dan dapat pula dimiliki oleh warga negara asing yang telah berdomisili di negara tersebut selama 20 tahun, namun sejak tahun 1993 hal itu tidak berlaku lagi

memberikan kutipan akta nikah kepada orang yang membutuhkan akan memperoleh pendapatan dari kutipan akta nikah tersebut adalah dari satu buah kutipan akta nikah itu ialah Rp. 300.000.

Jadi penulis menekankan bahwa sebagai bukti adanya perkawinan secara hukum nasional (negara) adalah akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang resmi untuk itu, lebih lanjut bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 5, 6 dan 7 yang merupakan penegasan landasan yuridis perkawinan nasional, bagi umat Islam di Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam.
2. Setiap perkawinan harus dicatat.
3. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN).
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN.

Semua ketentuan yang disebutkan di atas bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh sebab itu perkawinan harus dicatat (pasal 5 ayat 1 KHI), berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN) tetap sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai contoh dalam kewarisan, hal ini bukanlah menjadi jaminan untuk berlakunya hukum kewarisan diantara mereka (suami, isteri,

dan anak-anak) salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dimungkinkan akan terjadi perselisihan terhadap harta yang ditinggalkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam memberikan kekuatan hukum terhadap suatu peristiwa perkawinan yang terjadi, melindungi hak-hak bagi pihak-pihak yang terkait.

Hal ini mengandung arti bahwa pencatatan nikah harus dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena memang dikehendaki sebagian masyarakat. Dari hasil penelitian terungkap pelaksanaan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan mudharat karena pelaksanaannya melanggar ketentuan syar'i.

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dan dicatatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan perkawinan yang sah menurut syara' dan memiliki kekuatan hukum dalam kehidupan bernegara. Sedangkan perkawinan yang sah menurut syara' tanpa ada bukti otentik dari pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam kehidupan bernegara.

Akibat hukum terhadap pelanggaran pencatatan nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Petugas yang berwenang

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 jo UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah,

thalak, dan rujuk jo UU No. 32 Tahun 1954 dinyatakan bahwa bagi pegawai pencatat nikah / penghulu dan P3N yang melaksanakan pencatatan nikah tidak sesuai dengan ketentuan dikenai ketentuan pidana hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.

Berdasarkan aturan yang telah ada jelaskan apabila kepala KUA / PPN / Penghulu dan P3N yang tidak melaksanakan pencatatan nikah dengan prosedur yang berlaku maka ketentuan pidana hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.

2. Petugas yang tidak berwenang

UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, thalak, dan rujuk pasal 3 ayat 2 jo UU No. 32 Tahun 1954 dinyatakan bahwa bagi yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dengan tidak ada haknya sesuai dengan ketentuan dikenai ketentuan pidana hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.

3. Masyarakat yang tidak melaporkan perkawinan mereka

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 jo UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, thalak, dan rujuk jo UU No. 32 Tahun 1954 dinyatakan bahwa bagi pegawai pencatat nikah / penghulu dan P3N yang melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan pidana hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.

Berdasarkan aturan yang telah ada jelaskan apabila kepala KUA / PPN / Penghulu dan P3N yang tidak melaksanakan pencatatan nikah dengan prosedur yang berlaku maka ketentuan pidana hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.³

Dalam syari'at Islam al-Qur'an maupun Sunnah tidak satupun mengatur secara kongkrik tentang pencatatan perkawinan, namun apabila telah ditelaah secara mendalam salah satu ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, ayat ini mengisyaratkan tentang perlunya suatu bukti otentik sebagai bukti telah dilangsungkannya suatu aqad atau perjanjian. Hal tersebut diperlukan agar peristiwa mempunyai kekuatan hukum. Bahkan didalam ayat ini pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian.

Menurut Hasan seorang pencatat wajib baginya mencatatkan bila tidak ada yang mencatat selain dia karena akan menimbulkan mudharat.⁴ Dari kewajiban pencatatan dalam transaksi muamalah ini, ulama kontemporer mengqiyaskan pada pencatatan dalam perkawinan karena sama-sama ada keterikatan antara dua belah pihak dan dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Persoalan pencatatan perkawinan, walaupun secara nyata UU mengharuskan untuk dicatat, namun ketentuan tersebut masih banyak yang mengabaikannya.

Masyarakat seharusnya sadar bahwa dengan dicatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang di KUA, akan diperoleh kepastian hukum

³Departemen Agama RI Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta : Depag, 1999), h. 99

⁴Abu Abdullah Muhammad dan Ahmad Qurtuby, *Al-Jami'ah al-Qur'an Al-Qurtuby* (tt thn), h. 38

tentang boleh atau tidak, sah ataupun tidaknya suatu perkawinan menurut syari'ah. Akibat perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum baik hukum agama maupun hukum positif. Sesuai dengan kaedah-kaedah ushul fiqih.

در أالفاسد مقدم غل خلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatannya.*⁵

Dari kaedah di atas dapat dilihat bahwa yang melakukan perkawinan yang tidak didaftarkan dan sisi lain akan membawa kemudharatan yang lebih besar yaitu terjadinya penyimpangan.

⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 74



- ① Penguji penerapan /
- ③ Guna sebagai penerapan /
1. → ke linearitas ?
2. →
3. →
- ③ Penerapan /



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Batang Kapas. Masyarakat Islam Kecamatan Batang Kapas adalah pengurusan izin nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman pemberitahuan kehendak nikah, pelaksanaan pengesahan perkawinan, penandatanganan akta nikah, dan penyerahan kutipan akta nikah.
2. Kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan masyarakat Kecamatan Batang Kapas. Masyarakat Kecamatan Batang ada perkawinannya tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan mahalnya untuk pengurusan perkawinan. Dan ada pula yang belum nikah tetapi mereka telah mempunyai kutipan akta nikah (tidak tercatat).

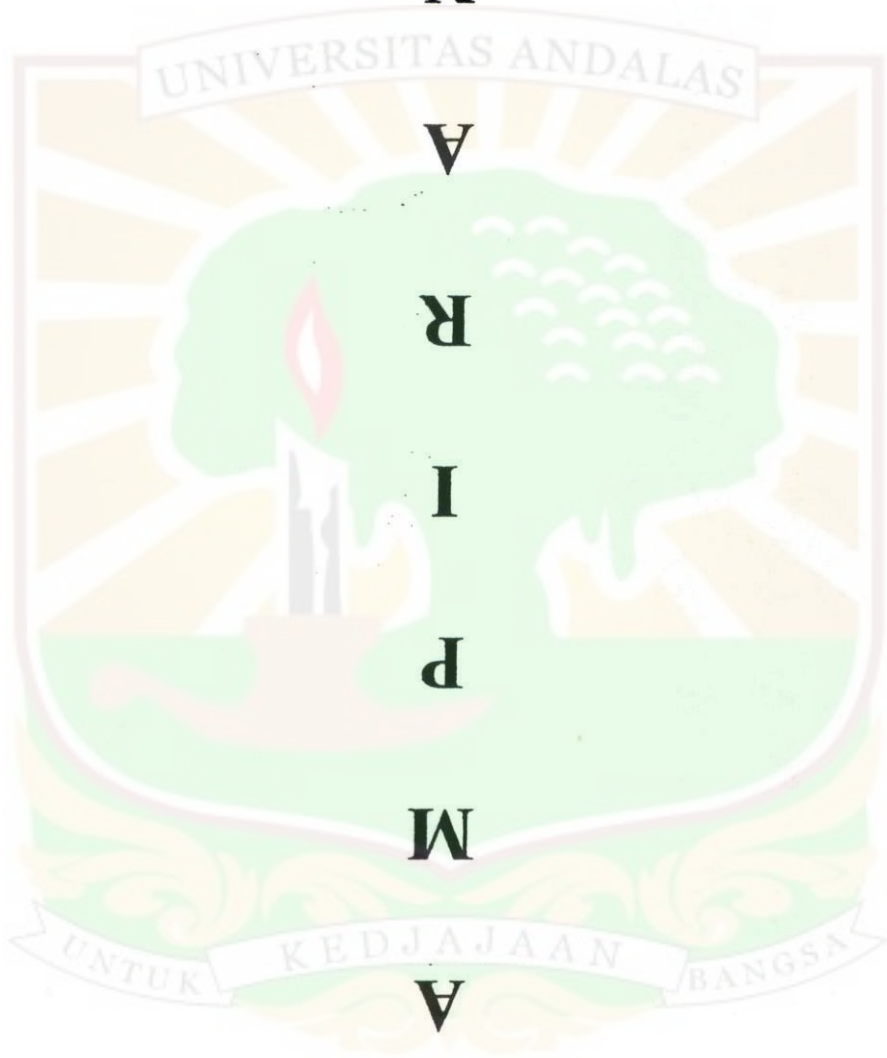
B. Saran-saran

1. Dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat hendaknya dihindarkan karena banyak mudharatnya.

2. Kepada semua masyarakat hendaklah dapat menghindari perbuatan ini, karena banyaknya mudharat bagi yang nikahnya tidak terdaftar dan menggunakan kutipan akta nikah yang tidak memenuhi syarat.



N



L